



INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

• Menjelaskan konsep WoG;
• Menjelaskan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi;
• Menganalisis best practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi.

5

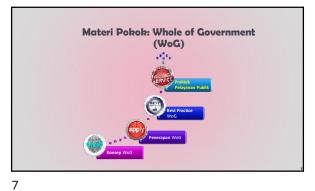
3



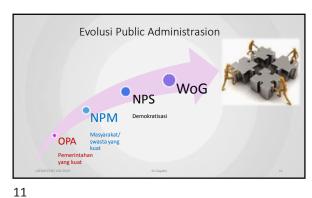


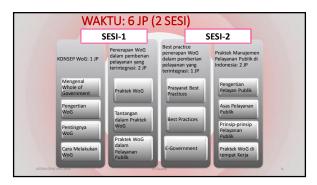


2 4













8 10



"An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise" (USIP)

Kata kundi: upaya kolaboratif, tujuan bersama, kerjasama

PENGERTIAN WOG: Definisi 3

Kata kunci: integrasi, koordinasi, kapasitas

• 'Whole-of-government' is an overarching term for a group of responses to the problem of increased fragmentation of the public sector and public services and a wish to increase integration, coordination and capacity (Ling, 2002).

13 15 17





Fungsi Koordinasi

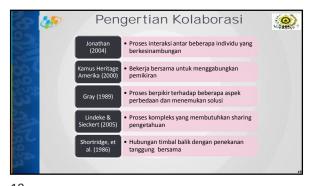
Fungsi manajemen: mengikat, mempersatukan, menyelaraskan semua aktivitas dan usaha

Fungsi koordinasi membuat fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan tanpa adanya koordinasi

Inti dari fungsi koordinasi adalah KOMUNIKASI

Koordinasi = Pencocokan

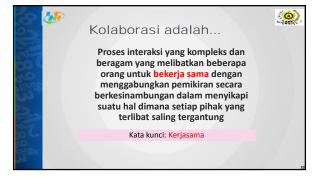
14 16 18

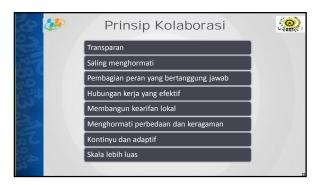






19 21 23

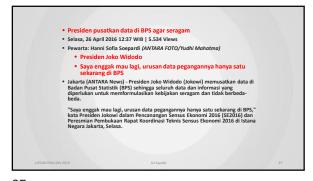






20 22







25 27 29





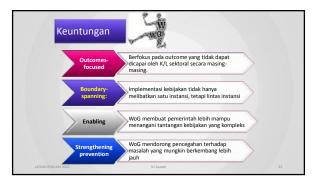


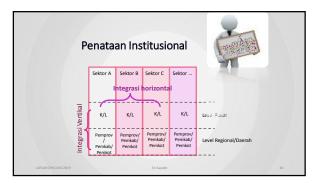
26 28 30













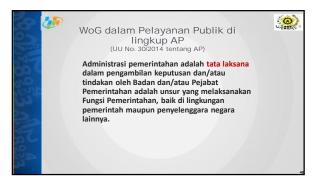
32 34 36













38 40 42







43 45 47







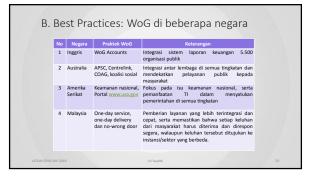
44 46 48







49 51 53







50 52 54

Implementasi WoG dalam Perspektif
Kebijakan di Indonesia

• Hakekat Dasar Pelayanan Publik

• WoG dalam Penyelenggaraan Negara

• WoG dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

• Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
(Pasal 4 (1) UUD 1945)

• ASN dan Pelayanan Publik

PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN

KEP. MENPAN NO. 63, TH. 2003

1. Kesederhanaan:
2. Kejelasan.
3. Kepastian waktu.
4. Akurasi
5. Keamanan.
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana prasana
8. Kemudahan akses.
9. Kedisiplinan.
10. Kenyamanan.

55 57 59

WOG Vertikal
Pasal 18A, 18B UUD 1945

Hubungan wewenang, yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang; dan

Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan Daerah.

UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik (Asas Penyelenggaraan PP) • Persamaan perlakuan/ tidak Kepentingan umum diskriminatif Kepastian hukum • Keterbukaan Kesamaan hak Akuntabilitas Keseimbangan hak dan • Fasilitas dan perlakuan kewajiban khusus bagi kelompok Keprofesionalan Ketepatan waktu Partisipatif Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. PerMen PAN/RB No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat Syarat penting dalam peningkatan pelayanan publik

1. Komitmen pimpinan

2. Perdubahan pola pake (minibat) terhadap funga pelayanan

3. Partisipasi masyarakat pengguna pelayanan

4. Kepercayaan

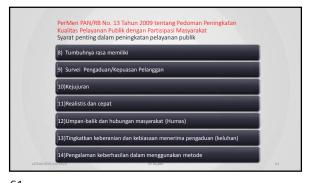
5. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik

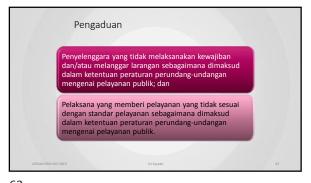
6. Keterbukaan

7. Ketersediaan anggaran

56 58 60

. .





EKESIMPULAN
 WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan negara (sistem administrasi kepemerintahan)
 Penyatuan upaya upaya kolaboratif dari seluruh sektor-sektor pemerintahan
 Optimalisasi koordinasi untuk mencapai tujuan bersama
 Keterlibatan semua lembaga dengan urusan yang sama

61 63

Pelayanan Publik di Daerah

• Maklumat Pelayanan

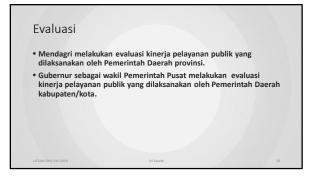
• Jenis pelayanan yang disediakan;

• Syarat, prosedur, biaya dan waktu;

• Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan

• Satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.

• UPTD (PP 18/2016)





62 64 66

. .

